



Tinjauan kesiapan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM di Banyuwangi

Novilia Kareja¹, Nurul Alfiyah², Dani Agung Wicaksono³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Banyuwangi

¹novilia@poliwangi.ac.id, ²nurul.alfiyah@poliwangi.ac.id, ³dani@poliwangi.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 10 Desember 2022

Disetujui 15 Januari 2023

Diterbitkan 11 Februari 2023

Kata kunci:

UMKM; SAK EMKM; Laporan keuangan; Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan; Dasar akrual

Keywords :

UMKM; SAK EMKM; Financial statements; Basic assumptions for the preparation of financial statements; Accrual basis

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan UMKM di Banyuwangi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Tinjauan atas kesiapan UMKM ini dilakukan pada beberapa aspek yakni kemampuan dalam pemenuhan karakteristik, tingkat kemampuan dalam pemenuhan asumsi dasar serta dasar pengukuran. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan bentuk dari penelitian ini. Responden dalam penelitian ini merupakan tenant binaan Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Banyuwangi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dari tingkat kemampuan atas pemenuhan asumsi dasar diketahui bahwa tingkat kemampuannya masih sangat minim. Dari tiga asumsi dasar penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, asumsi dasar kelangsungan usaha saja yang mampu dipenuhi oleh seluruh responden. Sementara itu, dasar akrual dan entitas bisnis masih belum diaplikasikan secara optimal oleh beberapa UMKM.

ABSTRACT

The research aims to obtain an overview of the readiness of MSMEs in Banyuwangi in preparing financial reports according to SAK EMKM. This review of MSME readiness is carried out on several aspects, namely the ability to fulfill characteristics, the level of ability to fulfill basic assumptions and the basis for measurement. Descriptive research with a qualitative approach is a form of this research. Respondents in this study were tenants assisted by the Banyuwangi State Polytechnic Business Incubator. The results of this study show that from the level of ability to fulfill the basic assumptions it is known that the level of ability is still very minimal. Of the three basic assumptions for preparing financial reports according to SAK EMKM, only the basic assumptions of business continuity can be fulfilled by all respondents. Meanwhile, the accrual basis and business entities are still not optimally applied by some SMEs.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha berskala kecil, yang dapat dikelola oleh sekumpulan orang maupun kelompok perorangan yang bertujuan mendirikan suatu usaha. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan laporan keuangan sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang diberikan kepada penggunanya yang berkaitan dengan kondisi perusahaan dan tujuannya itu untuk mendeskripsikan keadaan perusahaan dan pengambilan keputusan (Laheba & Bacilius, 2022). Laporan keuangan memegang peranan penting dalam proses perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan selaras dengan kaidah akuntansi akan membantu para pelaku UMKM untuk dapat melakukan evaluasi atas perkembangan dari usaha yang dijalankannya. Selain itu laporan keuangan akan membantu pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan dan strategi untuk kemajuan usaha yang sedang dijalankan agar usaha yang dijalankan tetap berlangsung serta meminimalisir terjadinya kebangkrutan (Khotijah, 2019). Sayangnya, tidak semua UMKM memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan.

Sejumlah hal dapat menjadi tantangan dalam pembuatan laporan keuangan oleh UMKM seperti yang dikemukakan oleh (Kareja et al., 2022). Adapun tantangan yang ditemukan dan dikemukakan ialah mengenai pola pikir dari pelaku usaha bahwa menyusun laporan keuangan itu merupakan hal yang rumit serta adanya keterbatasan waktu dan tenaga dalam menyusunnya. Selain itu,

minimnya tingkat kemampuan penyusunan menjadi alasan yang melatarbelakangi belum disusunnya laporan keuangan oleh UMKM di Banyuwangi yang menjadi responden dalam penelitian tersebut. Dewan Penyusun Standar Akuntansi (DSAK) dari Asosiasi Akuntansi Indonesia (IAI) telah menciptakan standar akuntansi dasar untuk UKM (Trisomantagani et al., 2017). Namun dengan tantangan yang telah dikemukakan diatas, implementasi dari standar ini pun bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya upaya untuk kembali menyelaraskan tujuan dibentuknya standar tersebut dengan kemauan dan kemampuan dari pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh (Warsadi et al., 2017) bahwa untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar maka perlu dilakukan pembenahan dari dalam entitas sehingga memudahkan dalam penerapannya.

Pemahaman atas kemauan dan kemampuan dari pelaku UMKM atas laporan keuangan menjadi faktor penting untuk dapat meningkatkan penerapan SAK EMKM. Keberadaan standar ini sendiri bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang UMKM melalui akuntabilitas dan transparansi sehingga diharapkan mampu memperoleh akses permodalan dari lembaga perbankan. Hal ini serupa dengan yang diungkap oleh (Dewi et al., 2019) bahwa keterbatasan akses pada lembaga keuangan menjadi salah satu problema yang dihadapi oleh UMKM. SAK EMKM seperti yang dinyatakan dan dipaparkan oleh sejumlah pihak telah disusun dengan bahasa yang sederhana dan bentuk yang ringkas namun penting untuk kita mengetahui sudahkah standar tersebut dimengerti oleh para pelaku UMKM. Selain itu, dengan standar yang ada tersebut kita perlu menyandingkan juga kemampuan UMKM dalam menyajikan laporan keuangan yang selaras dengan standar tersebut. Berikutnya hal yang paling penting yaitu motivasi yang mampu mendorong pelaku UMKM untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar. Keselarasan atas ketiga hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan dalam penyusunan laporan keuangan dan penerapan SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan oleh (Sholikin & Setiawan, 2018) yang menyatakan bahwa tingkat kesiapan UKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dua UKM di Kabupaten Blora tidak siap dalam menerapkan SAK EMKM. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2019) yang menyatakan bahwa pada 3 UMKM pengrajin mebel yaitu UD DJ, UD Abadi Jaya Mebel, dan Mebel Morodadi ditemukan bahwa ketiga UMKM tersebut belum siap menerapkan SAK EMKM dalam laporan keuangan mereka. Hal tersebut dikarenakan ketiganya belum mengetahui dan memahami tentang SAK EMKM, belum pernah membuat laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan, tidak ada pegawai khusus untuk menyelenggarakan pembukuan.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk dapat menyelaraskan antara keberadaan SAK EMKM dengan para pelaku UMKM. Guna mencapai keselarasan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan dari pelaku UMKM atas penyusunan laporan keuangan serta kemampuan yang dimiliki atas penyusunan laporan keuangan dan menyandingkannya dengan SAK EMKM yang ada ditinjau dari asumsi dasarnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu wawasan baru mengenai kemampuan dan daya serap UMKM terhadap SAK EMKM. Hasil ini memungkinkan untuk menjadi suatu bahan evaluasi atas keberadaan standar akuntansi yang telah mulai berlaku efektif pada 01 Januari 2018 sehingga diharapkan akan ada perkembangan baik dalam pola penerapannya maupun keberadaan standarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena serta kondisi yang dihadapi oleh subjek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2014), penelitian kualitatif bukan penelitian yang semata-mata mencari kebenaran namun juga pemahaman terhadap sekelilingnya. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Mei hingga September 2022. Responden dalam penelitian ini ialah Tenant Binaan Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Banyuwangi yang masih aktif dalam kegiatan yang dilangsungkan oleh Inkubator dan juga usaha yang dijalankan. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari pelaku usaha atau responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisisioner, wawancara serta studi literatur. Proses pengumpulan data dalam penelitian ditempuh melalui beberapa tahapan. Tahap pertama ialah pengenalan terhadap SAK EMKM untuk melihat tingkat pengenalan responden terhadap SAK EMKM. Tahapan berikutnya ialah penggalian data melalui kuisisioner dan secara mendalam melalui wawancara. Tahap selanjutnya data yang telah diperoleh dari

proses pengumpulan data disandingkan dengan teori dan kajian literatur yang ada untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam penerapan SAK EMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Standar SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM), sesuai dengan namanya, ditujukan sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan oleh entitas/usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Informasi ini dipertegas seperti yang tertuang dalam SAK EMKM pada bab 1 yakni mengenai Ruang Lingkup. Standar mengungkapkan beberapa ketentuan mengenai entitas yang dapat menerapkan penggunaan SAK EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016):

- a) Bukan merupakan entitas masuk ke dalam kategori entitas tanpa akuntabilitas publik secara signifikan sehingga patut menerapkan SAK ETAP atau sesuai dengan kriteria didalamnya serta memenuhi kriteria sesuai peraturan undang-undang setidaknya 2 tahun berturut-turut. Kriteria UMKM yang sesuai dengan UU No 20 tahun 2008 pada pasal 6 yang menyatakan kriteria UMKM (Republik Indonesia, 2008) sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria UMKM

Jenis Usaha	Kekayaan Bersih^{*)}	Hasil Penjualan Tahunan
Mikro	≤ Rp 50.000.000,00	≤ Rp 300.000.000,00
Kecil	> Rp 50.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	> Rp 300.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00
Menengah	> Rp 500.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00	> Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.000,00

- b) Standar berikut dapat digunakan oleh entitas yang tidak sesuai dengan kriteria yang tertera sebagaimana pada poin a bila telah disetujui oleh otoritas yang berlaku.
- c) Ketentuan lain yang diungkapkan ialah bahwa entitas tersebut tidak menjadi cabang perusahaan maupun anak perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian dari usaha menengah ataupun besar lainnya. Selain itu, UMKM penyusun laporan keuangan dengan SAK EMKM tidak sedang menguasai atau memiliki UMKM lainnya.

Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

Kerangka konseptual (*Conceptual Framework*) merupakan kerangka dasar dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan (Murtanto & Kemala, 2013). Kerangka ini merupakan cerminan dari rangkain terpadu yang memuat mengenai tujuan, dasar dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta keterbatasan yang berada di dalamnya dalam pelaporan keuangan memiliki sejumlah asumsi dasar dalam penyajiannya. Kerangka konseptual memiliki peran penting dalam proses pengembangan standar akuntansi baik yang baru maupun revisi atas suatu standar yang pernah ada sebelumnya (Hery & Si, 2013). Selaras dengan kerangka konseptual yang ada, SAK EMKM menggunakan tiga asumsi dasar dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan.

Asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM terdiri atas basis akrual, kelangsungan usaha serta konsep entitas bisnis. Akuntansi dengan dasar akrual merupakan suatu metode untuk penyalarsan biaya dengan pendapatan. Dasar akrual, seperti yang diungkapkan oleh (Pura, 2018), merupakan basis yang melakukan pengakuan serta pencatatan transaksi pada saat terjadinya tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar. Pendapatan yang dilaporkan merupakan pendapatan pada periode transaksinya sementara biaya yang dicantumkan merupakan biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dasar ini tentunya akan sangat berbeda dengan dasar kas. Dasar kas melakukan pengakuan dan pencatatan atas transaksi ketika kas diterima atau dikeluarkan. Dalam penggunaan basis kas ini, pencatat keuangan tidak mengenal adanya piutang. Dasar akrual pada akhirnya akan menghubungkan pendapatan dan biaya yang terjadi pada periode yang sama (Tatik, 2018). Berdasarkan basis akrual, akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan berupa aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan serta beban akan diakui ketika memenuhi kriteria yang berlaku untuk masing-masing akun (Putra, 2018).

Asumsi berikutnya ialah prinsip kelangsungan usaha merupakan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan bahwa entitas memiliki kemampuan untuk melanjutkan operasi dari usahanya untuk masa mendatang. Asumsi ini mendasarkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan penyusun melakukan penilaian terkait kemampuan dari UMKM dalam melanjutkan usahanya di masa selanjutnya, kecuali entitas penyusun bermaksud untuk melakukan likuidasi atas entitas tersebut. Penyusunan laporan keuangan tanpa asumsi ini menuntut pengungkapan mengenai alasan riil suatu entitas tidak memiliki kelangsungan usaha.

Selain kedua asumsi dasar tersebut, DSAK IAI sesungguhnya secara tidak langsung telah mencerminkan juga mengenai asumsi dasar terkait entitas bisnis. Konsep ini menekankan bahwa adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan pemilik dengan entitas termasuk pula untuk transaksi yang berlangsung di dalamnya. Apapun bentuk dari usaha yang digeluti baik perorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak, suatu entitas bisnis harus mampu melakukan pemisahan yang jelas dengan pemiliknya serta entitas-entitas lainnya. Hal ini seperti juga yang diungkapkan dalam Dasar Kesimpulan. Dorongan bahwa UMKM dapat melakukan pemisahan kekayaan pribadi dengan usaha merupakan bentuk dari penerapan asumsi dasar tersebut walaupun tidak secara implisit tercantum. Poin penting yang dituangkan oleh DSAK IAI ialah ketika UMKM memiliki kriteria dalam penerapan SAK EMKM namun bila didapati bahwa UMKM belum memiliki kemampuan dalam pemisahan kekayaan pribadi dan usaha maka UMKM memiliki pilihan untuk tidak menggunakan SAK EMKM. Ketiga asumsi dasar dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan ini digunakan selaras dengan kerangka konseptual dalam pelaporan keuangan yang juga selaras dengan standar akuntansi keuangan lainnya. Dasar penyajian laporan keuangan yang berbeda seperti dasar kas dapat menimbulkan informasi yang disajikan tidak relevan bila ditinjau dengan tujuan dari penyajian laporan keuangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh DSAK IAI dalam Dasar Kesimpulan yang tertuang dalam SAK EMKM (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016).

Dasar Pengukuran

Pengukuran berbasis biaya historis menjadi dasar pengukuran yang digunakan dalam SAK EMKM. Dasar pengukuran ini digunakan baik saat pengakuan awal hingga setelahnya. Dasar pengukuran dengan biaya historis dipilih dengan pertimbangan bahwa dasar pengukuran ini merupakan dasar pengukuran yang paling mudah untuk diaplikasikan serta dasar ini sesuai bagi kebutuhan penyajian laporan keuangan oleh UMKM. Pengukuran dengan basis nilai wajar dipandang kurang sesuai untuk UMKM dengan bentuk transaksi maupun jenis usaha yang relative tidak kompleks. Dasar pengukuran menggunakan biaya historis ini merupakan bentuk yang diharapkan lebih mudah diaplikasikan bagi UMKM. Pengukuran dengan menggunakan biaya historis bila disajikan dalam laporan keuangan berimplikasi pada beberapa hal. Salah satunya terkait perolehan aset. Aset yang diperoleh akan dicatatkan sebesar harga perolehannya. Selain itu, pengukuran atas liabilitas ialah sejumlah kas maupun setara kas yang diperoleh.

Laporan Keuangan Minimum

SAK EMKM mengisyaratkan ketentuan minimal dalam penyajian laporan keuangan. UMKM yang menerapkan SAK EMKM setidaknya dapat menyajikan laporan keuangan minimal yang terdiri atas neraca atau yang disebut dengan laporan posisi keuangan di akhir periode, laporan laba rugi dalam periode tersebut, serta catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi baik tambahan maupun rincian atas pos tertentu yang relevan.

Selayaknya standar yang lain. SAK EMKM memberikan petunjuk mengenai informasi yang sepatutnya ada dalam laporan posisi keuangan atau yang akrab dikenal dengan neraca yakni informasi terkait aset, liabilitas dan ekuitas. Dalam penyajian aset maupun liabilitas, UMKM diperkenankan untuk melakukan pemisahan baik aset dan liabilitas lancar dengan aset dan liabilitas tidak lancar. Laporan laba rugi dalam laporan keuangan dapat berisikan pos yang terdiri atas pendapatan, beban pajak maupun beban keuangan. Pos yang dimasukkan dalam laporan laba rugi merupakan pos yang sesuai atau relevan guna memahami kinerja dari entitas. Bagian lain dalam syarat minimum penyajian laporan keuangan dari UMKM ialah catatan atas laporan keuangan. Informasi yang dapat termuat pada bagian ini ialah pernyataan mengenai penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAK EMKM, rangkuman mengenai kebijakan akuntansi yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan,

dan informasi tambahan yang memuat atau menjelaskan mengenai transaksi-transaksi penting yang sifatnya material.

Dalam penyajian laporan keuangan, UMKM patut pula menyajikan informasi terkait identitas penyusun laporan keuangan berupa nama UMKM, periode penyusunan, mata uang dalam penyajian laporan keuangan, serta pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Selain hal tersebut, SAK EMKM juga memberikan arahan dalam menyajikan informasi komparatif bagi seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berjalan. Ketentuan-ketentuan tersebut digunakan guna mencapai penyajian laporan keuangan yang wajar. Penyajian wajar atas laporan keuangan memberikan arahan kepada UMKM untuk menampilkan informasi guna mencapai tujuan diantaranya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Informasi yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau relevan

- a) Informasi yang tertuang pada laporan keuangan mampu mencerminkan dengan tepat yang disajikan (Representative tepat)
- b) Informasi yang tersaji dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya (keterbandingan)
- c) Informasi yang tersaji mudah dipahami oleh pengguna dengan asumsi wawasan yang memadai dan dorongan memahami laporan keuangan tersebut (keterpahaman) dimiliki pengguna.

Keselarasn Karakteristik dengan SAK EMKM

Tenant Binaan Inkubator Bisnis telah memiliki pengetahuan dasar mengenai penyusunan laporan keuangan. Hal ini didasarkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa pada tahun 2021 seluruh tenant telah mendapatkan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan oleh inkubator bisnis. Pelatihan tersebut berisikan muatan materi mengenai tahapan penyusunan laporan keuangan bagi usaha skala UMKM. Dalam pelatihan tersebut. Tenant Binaan Inkubator memperoleh pemahaman mengenai cara perhitungan HPP dan penyusunan laporan keuangan namun belum secara spesifik membahas mengenai SAK EMKM. Informasi berikut menjadi penting dalam pelaksanaan penelitian ini khususnya dalam menggali kedalaman kemampuan dari responden.

Wawasan mengenai penyusunan laporan keuangan ini sesungguhnya tidak hanya responden terima dari kegiatan tersebut saja. Beberapa tenant telah secara aktif menggali dan mencari tahu mengenai pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada pihak yang telah lama bergelut dengan pencatatan keuangan UMKM. Namun kemampuan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh setiap responden berbeda. Berikut merupakan tabel data responden dan informasi mengenai pengenalan mereka dengan SAK EMKM.

Tabel 2 Profil Responden

No	Nama Usaha	Tahun Berdiri	Bidang Usaha	Omset per Bulan	Kenal SAK EMKM sebelumnya
1.	UM	2019	Digital Marketing	Rp. 3.000.000	Belum Pernah
2.	DP	2020	Jasa Dekorasi	Rp. 8.000.000	Belum Pernah
3.	ABJ	2020	Kuliner	Rp. 2.000.000	Belum Pernah
4.	DF	2020	Olahan Makan	Rp. 5.000.000	Belum Pernah
5.	LM	2020	Minuman	Rp. 5.000.000	Belum Pernah
6.	OB	2018	Makanan	Rp. 5.000.000	Belum Pernah
7.	JMS	2017	Minuman	Rp. 7.000.000 – Rp 10.000.000	Belum Pernah
8.	APM	2014	Minuman	Rp. 25.000.000	Belum Pernah

Sumber : Data Penelitian (2022)

Hasil tabulasi diatas memperlihatkan bahwa dari segi karakteristik yang ditinjau dari omset yang diperoleh maka responden telah memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan karakteristik dalam SAK EMKM. Responden yang ada masuk dalam kriteria UMKM yang memiliki kesempatan untuk melakukan penerapan SAK EMKM. Namun sayangnya, seluruh responden yang ada tidak atau belum pernah mengenal SAK EMKM sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi suatu tantangan untuk bisa membuat peningkatan penerapan SAK EMKM.

Kemampuan Penyusunan berdasarkan Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan

UM merupakan salah satu pelaku usaha di bidang *digital marketing*. Latar belakang pendidikan dari pemilik ialah di bidang teknik informatika dan saat ini beliau masih menyelesaikan pendidikan di

D-III Teknik Informatika. Penyusunan laporan keuangan masih menjadi kendala bagi pemilik. Pemilik memiliki kendala dalam memahami mengenai sistem perhitungan yang tepat dan sesuai dalam pengelolaan keuangan usaha. Sejauh ini, bentuk pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UM ialah pencatatan manual terkait pemasukan dan pengeluaran dari usaha. Selain itu, pemilik dari UM telah melakukan pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Hal ini telah selaras dengan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan dengan SAK EMKM yakni asumsi dasar entitas bisnis.

Pengalaman serupa juga dimiliki oleh DP, tenant binaan yang bergerak dalam bidang jasa dekorasi. Di usia yang terbilang cukup muda, pemilik Dua Pillar telah berhasil mendapatkan omset Rp 8.000.000 per bulannya. Pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh pemilik ialah mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap kali ada job. Selanjutnya, pelaku usaha menggunakannya untuk pengembangan usaha. Kendala pencatatan keuangan tetap dialami dan dihadapi oleh pemilik DP terkait dengan pajak. Namun, asumsi entitas bisnis telah dapat dipenuhi oleh DP yakni adanya pemisahan keuangan pribadi dan keuangan usaha.

Tenant berikutnya ialah ABJ. ABJ bergerak dalam bidang makanan. Pencatatan keuangan yang sejauh ini dilakukan ialah pencatatan manual yang belum dilakukan secara konsisten. Pemilik merasakan bahwa pencatatan laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan usaha dari ABJ. Namun, kendala masih juga dihadapi oleh pelaku usaha. Pemilik belum melakukan pemisahan laporan keuangan dari pribadi dan usaha. Bentuk laporan keuangan yang sejauh ini pemilik susun ialah laporan laba rugi. Responden selanjutnya ialah DF yang bergerak dalam usaha pengolahan makanan. DF sejauh ini melakukan pencatatan arus kas dengan mencatat semua transaksi pada buku keuangan. Beliau cukup akrab dengan pencatatan keuangan dan beliau menyadari bahwa pencatatan keuangan merupakan hal penting dalam pengembangan usaha. Kendala yang dihadapi ialah konsistensi dalam melakukan pencatatan. Responden berikutnya dengan pengalaman serupa ialah LM, OB, dan APM. Responden tersebut bergerak dalam usaha *food and beverage*. Bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan oleh LM dan APM berupa laporan laba rugi dan arus kas. Sementara itu, OB baru sebatas laporan laba rugi sederhana yang masih terbatas dan tidak konsisten dilakukan.

Pembahasan

Hasil yang telah dipaparkan memperlihatkan bahwa dari tiga asumsi dasar yang diharapkan diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan didapati bahwa kemampuan untuk menyusun dengan asumsi kelangsungan usaha yang baru terpenuhi. Hal ini pun dapat terjadi bukan karena pemahaman pihak responden mengenai asumsi dasar dalam pelaporan keuangan melainkan karena motivasi masing-masing pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya. Sementara itu, asumsi dasar akrual belum dapat dipenuhi dikarenakan responden masih menggunakan metode bauran. Metode bauran yang dimaksud disini ialah pelaku usaha menggunakan basis pencatatan dengan basis kas namun memiliki akun piutang dalam pencatatannya. Asumsi dasar lain yang belum sepenuhnya dipenuhi ialah terkait entitas bisnis. Sejumlah responden masih belum memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Sehingga bisa dikatakan bahwa Dari tiga asumsi dasar penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, asumsi dasar kelangsungan usaha saja yang mampu dipenuhi oleh seluruh responden. Sementara itu, dasar akrual dan entitas bisnis masih belum diaplikasikan secara optimal oleh beberapa UMKM. Sehingga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2019) yang menyatakan bahwa pada 3 UMKM pengrajin mebel yaitu UD DJ, UD Abadi Jaya Mebel, dan Mebel Morodadi ditemukan bahwa ketiga UMKM tersebut belum siap menerapkan SAK EMKM dalam laporan keuangan mereka. Hal tersebut dikarenakan ketiganya belum mengetahui dan memahami tentang SAK EMKM, belum pernah membuat laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan, tidak ada pegawai khusus untuk menyelenggarakan pembukuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari segi asumsi dasar yang harusnya dipenuhi oleh penyusun laporan keuangan dengan SAK EMKM menunjukkan bahwa asumsi dasar penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya terpenuhi. Asumsi dasar mengenai dasar akrual belum digunakan oleh UMKM karena proses pencatatan yang dilakukan masih menggunakan basis kas. Asumsi berikutnya terkait entitas bisnis diperoleh gambaran bahwa masih banyak ditemui bahwa pelaku UMKM belum seluruhnya melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Asumsi kelangsungan usaha merupakan bentuk asumsi yang dapat

dipenuhi oleh UMKM selaras dengan SAK EMKM. Guna mempersiapkan penerapan SAK EMKM dalam laporan keuangan, penting untuk mempersiapkan kemampuan dasar dalam penerapan asumsi dasar khususnya terkait pemahaman dasar akrual dan asumsi entitas bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, P. W. K., Herawati, N. T., & Yasa, I. N. P. (2019). Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sak Emkm Pada Garment Taman Sari Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(2), 57–67.
- Hery, C., & Si, M. (2013). Teori Akuntansi. *Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). *SAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kareja, N., Alfiyah, N., & Setiadevi, S. (2022). Tantangan Peningkatan Penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Banyuwangi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2507–2515.
- Khotijah, S. (2019). *Kesiapan UMKM dalam implementasi SAK EMKM (Studi Kasus UD Turbo Sakti Manding Daya)*. Universitas Wiraraja.
- Laheba, L. C., & Bacilius, A. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Pembuatan Selempang. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 216–224.
- Lestari, E. P. (2019). Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM Pengrajin Mebel Desa Catak Gayam, Mojowarno. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(1), 24–33.
- Murtanto, M., & Kemala, A. (2013). Pemahaman Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan PSAK pada Akuntan Publik. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 13(1), 59–78.
- Pura, R. (2018). *Pengantar Akuntansi 1; pendekatan siklus akuntansi*. Erlangga.
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 11(2), 201–217.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Blora). *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 1(2), 35–50.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Tatik, T. (2018). Implementasi SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah) Pada Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM XYZ Yogyakarta). *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 1–14.
- Trisomantagani, I. K. A., Yasa, I. N. P., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., & Si, M. (2017). Persepsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Kesiapan Dalam Menerapkan Sak Emkm. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Warsadi, K. A., Herawati, N. T., Ak, S. E., & Julianto, I. P. (2017). Penerapan penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil menengah berbasis standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah pada PT. mama jaya. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).